

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan pembangunan bangsa adalah mutu pendidikan yang semakin meningkat. Pendidikan yang baik dan berkualitas tentunya dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Semakin hari, berganti tahun, menyikapi era globalisasi yang datang tentu kualitas sumber daya manusia juga harus semakin meningkat, itulah tantangan besar pendidikan di bagi bangsa Indonesia pada saat sekarang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk menilai mutu pendidikan di Indonesia dilihat dengan delapan kriteria, yaitu isi (kurikulum), proses pembelajaran, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana prasarana, pengelola pendidikan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan. Kurikulum menempati urutan pertama dalam delapan kriteria tersebut yang menunjukkan bahwa kurikulum mempunyai peranan yang besar dalam menentukan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kurikulum merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan. Perubahan kurikulum dapat mewujudkan mutu pendidikan yang semakin berkualitas. Demi mewujudkan cita-cita luhur tersebut pemerintah dan terutama peran guru di dalam kelas mempunyai peran andil yang sangat besar dan tidak bisa dipisahkan. Seorang guru harus memiliki kompetensi yang baik, sehingga dengan kompetensi yang dimilikinya tersebut akan mampu menyalurkan serta mengajarkan berbagai pengetahuan kepada peserta didik dengan baik. Pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/atau kelompok yang unik baik sebagai warga Negara. Dengan memahami

substansi PKN yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), seorang guru harus mampu menguasai ketiga substansi PPKn tersebut agar mampu mengajarkan kepada peserta didik sebagai warga negara yang baik (Cholisin, 2015: 13).

Mata pelajaran PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan strategis dan penting dalam membentuk sifat dan sikap peserta didik dalam berperilaku keseharian, sehingga diharapkan setiap individu mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan berakhlak baik. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menuntut peserta didik menunjukkan sikap yang baik, kritis, kreatif, dan bertanggungjawab. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran PPKn belum tercapai sebagaimana yang diharapkan, termasuk yang dialami oleh peserta didik di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta. Arus modernisasi seperti masuknya budaya asing dari luar telah banyak memberi perubahan dalam kehidupan masyarakat, khususnya di kalangan para pelajar. Oleh karena itu terjadi penurunan moral dan akhlak yang tengah menjalar dan menjangkiti bangsa ini. Hal yang tampak nyata dan sering dilakukan adalah, sikap anak zaman sekarang yang cenderung tidak menghormati orang tua dalam berperilaku, suka membuat gaduh pada saat proses pembelajaran, sering terlambat masuk kelas baik pada jam pertama maupun setelah istirahat, suka membolos, tawuran antar pelajar dan tindakan-tindakan negatif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa melemahnya karakter anak-anak bangsa sehingga nilai-nilai luhur menjadi tenggelam.

Pelaksanaan proses mengajar selama ini, pada umumnya guru kurang kreatif dalam menerapkan inovasi pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Hal ini terjadi karena pola pikir belajar diartikan sebagai perolehan pengetahuan, dan mengajar adalah memindahkan pengetahuan kepada peserta didik yang telah disebutkan di atas, di samping itu pembelajaran ditekankan pada hasil, bukan pada proses. Akibatnya guru terpaksa mengajar

dengan sistem konvensional dengan penggunaan metode ceramah dan cara peserta didik belajar lebih dominan dengan menghafal. Kondisi demikian apabila dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan berimbas kepada peserta didik lain, bahkan dikhawatirkan peserta didik akan mengalami kegagalan dalam belajar. Oleh sebab itu, tenaga pendidik PPKn sebagai salah satu guru yang memiliki tugas dan kewajiban untuk membentuk sikap dan perilaku serta moral peserta didik. Guru merasa ikut bertanggungjawab atas kondisi tersebut, paling tidak guru PPKn memberikan penekanan-penekanan akan perilaku anak yang bisa dikendalikan, dan secara perlahan bisa dihilangkan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), secara imperatif digariskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itulah pembentukan karakter bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab sangat diperlukan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Secara historis epistemologis dan pedagogis, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai program kurikuler dimulai dengan diperkenalkannya mata pelajaran *Civics* dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang memuat materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, mata pelajaran *Civics* atau kewarganegaraan, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi

manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Istilah *Civics* tersebut secara formal tidak dijumpai dalam kurikulum tahun 1957 maupun dalam kurikulum tahun 1946. Namun secara materiil dalam kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang didalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan (Udin, 2012:168).

Dalam kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah isinya sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975. (Depdikbud dalam Udin, 2012:169).

Sebagai implikasinya, dalam Kurikulum persekolahan tahun 1994 diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) yang berisikan materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral/artikulatif atas dasar butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung dalam Pancasila. Bila dianalisis dengan cermat, ternyata baik istilah yang dipakai, isi yang dipilih dan diorganisasikan, dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mata pelajaran *Civics* atau PKN atau PMP atau PPKn yang berkembang secara fluktuatif hampir empat dasawarsa (1962-1998) itu, menunjukkan indikator telah terjadinya ketidakajekan dalam kerangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual, yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler. Krisis atau *dislocation* menurut pengertian Kuhn yang bersifat konseptual tersebut tercermin dalam ketidakajekan konsep seperti: *civics* tahun 1962 yang tampil dalam bentuk indoktrinasi politik, *civics* tahun 1968 sebagai unsur dari pendidikan kewargaan negara yang bernuansa

pendidikan ilmu pengetahuan sosial sosial, PKN tahun 1969 yang tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS, PKN tahun 1973 yang diidentikkan dengan pengajaran IPS, PMP tahun 1975 dan 1984 yang tampil mrnggantikan PKN dengan isi pembahasan P4, dan PPKn 1994 sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatkan dari Pancasila dan P4. Krisis operasional tercermin dalam terjadinya perubahan isi dan format buku pelajaran, penataran guru yang tidak artikulatif, dan fenomena kelas yang belum banyak bergeser dari penekanan pada proses kognitif memorisasi fakta dan konsep (Udin, 2012: 74).

Untuk saat ini kurikulum yang berlaku di Indonesia yaitu Kurikulum 2013 atau lebih dikenal dengan K 13. Terjadi perubahan nama yang semula Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), yang mana Kurikulum 13 ini pelajaran PPKn lebih mengajarkan pada sikap dengan pembelajaran menggunakan pendekatan 5 M atau pendekatan *Saintifik*. Dari penjelasan diatas sudah diterangkan secara jelas bahwa kurikulum pendidikan pancasila dan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan. Baik itu dari perubahan dari segi nama, tujuan, metode, dan materi. Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan itu sendiri merupakan mata pelajaran yang kompleks dalam hal materi, guru dan siswa dituntut untuk menguasai seluruh materi PPKn. Adanya mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan juga memberi pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hal itu juga tercermin dalam proses pembelajaran jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah tingkat pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan sebagai lanjutan dari SMP/MTs. Peserta didik dapat memilih bidang kejuruan berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki. Alasan peneliti memilih Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Yogyakarta sebagai tempat penelitian karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan dalam pelaksanaan kurikulum, yang mana mata pelajaran PPKn di SMK sering tidak diperhatikan oleh peserta didik karena peserta didik lebih tertarik pada mata pelajaran bidang keahlian yang diambil.

Adanya perubahan dinamika kurikulum PPKn dari masa ke masa juga mempengaruhi perubahan pada tujuan, metode maupun materi yang diajarkan. Banyak guru yang belum mampu atau kurang memahami seluruh perubahan-perubahan tersebut sehingga menjadi kendala saat harus mengajarkan kepada peserta didik. Perubahan kurikulum tersebut diharapkan mampu menjadikan guru maupun peserta didik ke arah yang lebih baik. Alasan tersebut yang membuat peneliti tertarik akan **“Pemahaman Guru Tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan di atas dapat diidentifikasi permasalahan yang dapat diteliti yaitu:

1. Adanya indikasi bahwa guru kurang memahami pelaksanaan kurikulum baik dari segi nama, tujuan, materi maupun metode dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
2. Mengidentifikasi tanggapan guru terhadap kurikulum PPKn yang berlaku di Sekolah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas terdapat banyak guru yang merasa tidak memahami akan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun karena keterbatasan dana, waktu serta tenaga maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pemahaman guru mengenai pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang meliputi :

1. Pemahaman guru mengenai pergantian nama, tujuan, materi maupun metode dari mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.
2. Tanggapan guru terhadap kurikulum PPKn yang berlaku di Sekolah.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman guru tentang pergantian nama, tujuan, materi, maupun metode mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana tanggapan guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap pelaksanaan kurikulum PPKn yang berlaku di Sekolah ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman guru mengenai pergantian nama, tujuan, materi maupun metode dari mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di SMK Negeri se-Kota Yogyakarta.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana tanggapan guru mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terhadap pelaksanaan kurikulum PPKn yang berlaku di Sekolah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara :

1. Teoretis
 - a. Menambah perbendaharaan pengetahuan pelaksanaan kurikulum dari nama, tujuan, metode maupun materi dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

b. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis serta menambah wawasan keilmuan dalam bidang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

2. Praktis

a. Bagi Guru

Dengan adanya penelitian ini diharapkan guru dapat mengetahui pelaksanaan mengenai pergantian nama, tujuan, metode maupun materi dari mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Selain itu diharapkan guru dapat memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan dan mempertahankan kelebihan-kelebihannya yang berkaitan dengan mengajar dari mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

b. Bagi Siswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa tidak lagi diposisikan sebagai obyek pembelajaran di sekolah namun sebagai subyek yang dapat diberikan ruang dan kesempatan untuk dapat mengemukakan pendapat dan aspirasinya terhadap pelaksanaan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berkaitan dengan pergantian nama, tujuan, metode maupun materi dari mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, sehingga siswa juga mengetahui pentingnya mempelajari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

G. Batasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir terhadap masalah yang akan diteliti, maka peneliti perlu memberikan gambaran tentang maksud dari judul penelitian. Oleh sebab itu, ada sejumlah batasan istilah yang diberikan terkait judul penelitian yakni:

1. Pemahaman

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan berbagai hal yang ada di lingkungannya. Pendapat lain juga diungkapkan oleh para ahli, pemahaman (*comphrehension*) yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu itu diketahui atau diingat, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti bahan yang dipelajari, dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain (Sudaryono, 2012:43).

2. Guru

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pengertian PPKn menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dalam penelitian ini, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam pembentukan karakter warga negara yang baik.

4. Kurikulum

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (9) menjelaskan kurikulum ialah “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.”

Jadi yang dimaksud dengan kurikulum dalam penelitian ini adalah kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terkait perubahan-perubahan dari segi nama, tujuan, materi dan metode.

